

‘REMBUG DESA’ SEBAGAI BENTUK INTERVENSI PERILAKU EKOLOGIS PENGELOLAAN SAMPAH

‘REMBUG DESA’ INTERVENTION OF ECOLOGICAL BEHAVIOR OF WASTE MANAGEMENT

Mochamad Widjanarko

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus

Jl. Lkr. Utara No.17, Gondangmanis, Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59325, Indonesia

m.widjanarko@umk.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di desa Tempur, Kabupaten Jepara adalah belum memiliki perilaku ekologis untuk membuang sampah di tempat sampah karena jarang penduduk yang memiliki tempat sampah di rumahnya, penduduk kebanyakan membuang sampah di sungai yang mengalir di sepanjang desa dan tidak mempunyai rasa tanggungjawab bersama untuk membangun tempat sampah umum serta belum pernah bertemu dalam rembug desa untuk membahas pengelolaan sampah di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan intervensi dengan melakukan asesmen pengelolaan sampah dan rembug desa agar masyarakat memiliki perilaku ekologis dalam mengelola sampah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Participatory Rapid Appraisal (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data berupa koding. Simpulannya ada 30 anak muda yang tergabung dalam karang taruna dan 10 bapak-bapak masyarakat yang ada di Desa Tempur, Kabupaten Jepara bergotong royong membersihkan sungai dari sampah dan ada satu ibu yang mulai mengelola daur ulang sampah menjadi bahan tas serta dibangunnya dua tempat sampah umum di pinggir sungai.

Kata kunci: *intervensi perilaku ekologis, pengelolaan sampah*

ABSTRACT

The problem of the people living in the village of Tempur, Jepara Regency is that they do not have ecological behavior to dispose waste in the trash because it is rare the they have trash bins in their homes, then most residents dispose waste in rivers that flow along the village and have no sense of responsibility together to build a public garbage bin and have never met in a village meeting to discuss waste management there. The purpose of this study is to intervene by assessing waste management and village meetings so that the community has ecological behavior in managing waste. The method used in this study is Participatory Rapid Appraisal (PRA) or participatory village assessment. Data collection is done by observation and interviews. To do data analysis, this study uses the form of coding. The conclusion is, there were 30 young people of the youth group and ten men of in Tempur Village, Jepara Regency working together to clean the river from waste and there was one mother who began managing waste recycling into bag material and the construction of two public trash bins in river bank.

Keywords: *intervention of ecological behavioral, waste management*

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang telah mementingkan kebersihan lingkungan dipandang sebagai masyarakat yang kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang belum mementingkan kebersihan. Salah satu aspek yang dapat dijadikan indikator

kebersihan lingkungan adalah sampah. Bersih atau kotornya suatu lingkungan tercipta melalui tindakan-tindakan manusia dalam mengelola dan menanggulangi sampah yang mereka hasilkan.

Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculnya masalah

masalah dan kerusakan lingkungan. Bila perilaku manusia semata-mata mengarah lebih pada kepentingan pribadinya, dan kurang atau tidak mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan bersama, maka dapat diprediksi bahwa daya dukung lingkungan alam semakin terkuras habis dan akibatnya kerugian dan kerusakan lingkungan tak dapat dihindarkan lagi. Oleh karena itu, sampah dan benda-benda buangan yang banyak terdapat di lingkungan kehidupan kita perlu ditanggapi secara serius dan perlu dicari cara yang tepat untuk menanggulangnya (Wibowo, 2009).

Desa Tempur merupakan sebuah desa yang berada di sisi barat pegunungan Muria yang berhubungan langsung dengan puncak 29 (Songolikur) dan hutan negara seluas 1.497,500 ha. Secara Administratif wilayah Desa Tempur terdiri dari 25 RT dan 6 RW meliputi 6 dukuh yaitu Dukuh Kemiren, Dukuh Petung, Dukuh Pekoso, Dukuh Glagah, Dukuh Karangrejo dan Dukuh Duplak. Secara topografi, Desa Tempur dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi melingkari desa yang terdiri dari tebing gunung dan membentuk pegunungan, wilayah daratan rendah di bagian tengah yang merupakan bagian bekas kawah purba, Gunung Muria.

Desa Tempur berbatasan dengan Desa Sumanding, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, di Utara dengan Desa Medani, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, di sebelah Timur dengan Dukuh Semliro, Desa Rahtawu Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus di Selatan serta berbatasan dengan Gunung Candi Angin pegunungan Muria di sebelah Barat. Jarak Desa Tempur ke Kecamatan Keling adalah 25 km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara adalah 50 km atau bisa ditempuh 2 jam mengendarai kendaraan roda empat (Widjanarko, 2014).

Desa Tempur merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Jepara, tentunya memiliki keindahan pemandangan dan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kecuali keindahan alam, hasil pertaniannya, terutama kopi sangat menjanjikan. Namun, dalam pengelolaan sampahnya masih butuh banyak perhatian dari berbagai pihak, baik dari warga masyarakat sendiri, instansi pemerintahan maupun non pemerintah sehingga desa Tempur bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa di banggakan bahkan menjadi ikon kota Jepara.

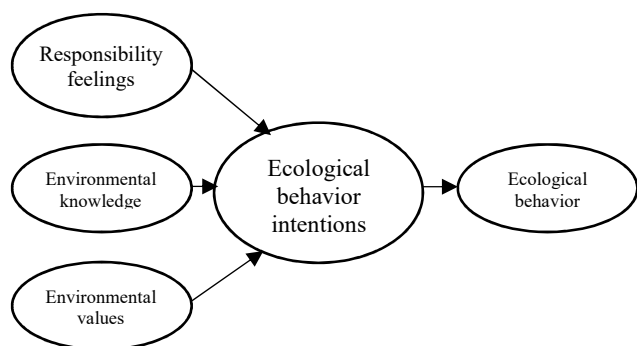
Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di desa Tempur, Kabupaten Jepara adalah belum memiliki perilaku untuk membuang sampah di tempat sampah karena jarang penduduk yang memiliki tempat sampah di rumahnya, penduduk kebanyakan membuang sampah di sungai yang mengalir di sepanjang desa dan tidak mempunyai rasa tanggungjawab bersama untuk membangun tempat sampah umum serta belum pernah bertemu dalam rembug desa untuk membahas pengelolaan sampah di desa.

Desa-desa di Indonesia memiliki beragam bentuk tradisi musyawarah yang dapat dimanfaatkan dalam pengadaan musyawarah anggaran dengan memanfaatkan semangat gotong royong dan senasib sepenangungan. Dalam tradisi Jawa kita mengenal 'rembug desa', sedangkan di Sumater Barat kita mengenal 'kerapatan nagari'. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial (Priyono dan Tjiptoherijanto, 1983).

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan intervensi dengan melakukan asesmen pengelolaan sampah dan rembug desa agar masyarakat memiliki perilaku ekologis dalam mengelola sampah.

Istilah perilaku ekologis, secara asal kata, merupakan integrasi antara kata perilaku (*behavior*) dengan kata ekologis (*ecological*). Perilaku ekologis merupakan salah satu bukti nyata adanya integrasi antara disiplin psikologi yang mengkaji perilaku dan proses mental manusia (Feldman, 2002) dengan ekologi sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya (Odum, 1959 dalam Iskandar, 2001).

Teori perilaku ekologis dipopulerkan oleh Kaiser dengan mengembangkan pengukuran perilaku ekologis yang disebut *General Ecological Behavior* (GEB). Lebih lanjut Kaiser (1998) mengatakan bahwa dalam pengukurannya, terdapat dua ciri perilaku ekologis, pertama beberapa perilaku ekologis lebih sulit dilakukan daripada yang lain. Kedua, perilaku ekologis rentan terhadap banyak pengaruh.



Gambar 1, Perilaku Ekologis. Kaiser, F.G., Ranney, M., Hartig, T., Bowler, P.A. (1999)

Pada gambar diatas, kajian perilaku ekologis mulai mempertimbangkan moralitas dan perilaku prososial (*pro social behavior*), bahwa perilaku ekologis bukan semata-mata pertimbangan rasional. Tetapi juga memasukkan variabel *responsibility feeling*, kajian perilaku ekologis juga mempertimbangkan etika lingkungan hidup.

Rasa tanggung jawab diartikan sebagai perasaan memiliki kewajiban mengenai keadaan tertentu. Semakin seseorang merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang ada maka semakin besar kemungkinannya seseorang memunculkan perilaku ramah lingkungan (Kaiser dan Shimoda, 1999).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa perasaan tanggung jawab dapat muncul setidaknya melalui dua cara, yang pertama mengacu pada aspek moralitas dan yang lain mengacu pada aspek kesesuaian dengan harapan sosial. Perasaan tanggung jawab berkaitan dengan konsep moral seperti kesejahteraan, hak-hak orang lain dan pertimbangan keadilan. Sedangkan perasaan tanggung jawab berkaitan dengan aspek kesesuaian dengan harapan sosial didasarkan pada kebiasaan sosial atau tradisi dan undang-undang dari lingkungan sosial. Kedua jenis tanggung jawab ini menyebabkan emosi yang berbeda, rasa malu dirasakan saat standar sosial dilanggar dan rasa bersalah dialami saat melanda standar moral (Kaiser & Shimoda, 1999).

Salah satunya adalah pengetahuan lingkungan. Pengetahuan dianggap sebagai sarana untuk mengatasi hambatan psikologis seperti ketidaktauan dan informasi yang salah. Pengetahuan yang dimaksud dapat berupa informasi mengenai masalah-masalah lingkungan yang terjadi. Pengetahuan juga dapat berupa wawasan mengenai cara-cara untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan (Kaiser & Fuhrer, 2003). Menurut Frick, Kaiser dan Wilson (2004) pengetahuan mencegah penghalang seperti ketidakpedulian dan kesalahan informasi sehingga dapat mempromosikan perilaku tertentu, dalam hal ini pengetahuan mengenai lingkungan dapat mempromosikan perilaku-perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan.

Hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat negara terbentuk secara imajiner, seperti dinyatakan oleh seorang antropolog, perasaan sebagai sesama orang sedesa tumbuh secara empiris dan personal, yaitu hasil dari pergaulan sehari-hari termasuk dari hubungan kekerabatan. Hubungan-hubungan tersebut seringkali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Secara umum misalnya hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, saudara dekat dengan saudara jauh, berkerabat atau tidak berkerabat.

Salah satu titik tekan dari kenyataan berdesa yang harus diperhatikan dalam demokrasi desa adalah sifat kolektivitas masyarakat desa. Dalam sifat kolektivitas tersebut, masyarakat desa memiliki kecenderungan umum

untuk mendahulukan permusyawaratan daripada pemungutan suara. Komunitas-komunitas lokal di seluruh Indonesia mengenal sistem permusyawaratan itu dalam berbagai nama. Di Jawa dikenal *rembug desa*, *Kerapatan Adat Nagari* di Sumatera Barat, *Saniri Negeri* di Maluku, *Gawe Rapah* di Lombok, *Kombongan* di Toraja, *Paruman* di Bali, *kuppulan* atau *kakuppulan* di Lampung, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga permusyawaratan tersebut sesungguhnya menjadi modal sosial dasar bagi demokrasi, sekaligus pintu masuk bagi demokratisasi desa tanpa mencederai tradisi desa.

Kata lainnya, demokratisasi desa harus dikembangkan dari kekayaan tradisi desa sesuai asal-usul desa dan pola sosio budaya masyarakat desa itu sendiri. Sehingga demokrasi desa tumbuh hasil pergulatan masyarakat desa dengan kekayaan sosio budaya yang mereka miliki, bukan cangkakan mentah-mentah dari luar.

Rembug desa yang menjadi bagian dalam proses musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam rembug desa, akal (bukan *okol*, atau otot) dan pikiran jernih khas masyarakat desa yang memandu pertukaran argumentasi. Bedanya, apabila adu argumentasi dalam demokrasi deliberatif berangkat dari ruang pengalaman masyarakat *urban*, pertukaran argumentasi dalam musyawarah berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat desa (Amanulloh, 2015).

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif. Metode *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik pengelolaan sampah di desa Tempur, berapa dukuh dalam wilayah desa, jumlah penduduk yang memiliki sampah dan upaya yang sudah dilakukan oleh desa Tempur dalam mengelola sampah.
- 2) Asesmen pengelolaan sampah, metode ini digunakan untuk menggali masalah yang berhubungan dengan perilaku ekologis terutama perilaku masyarakat di desa Tempur dalam membuang sampah.

Pada asesmen pengelolaan sampah terdapat 5 informan yang diwawancarai, yaitu satu warga desa, satu bidan desa, satu orang yang menjabat sebagai

ketua karang taruna, satu orang kepala desa dan satu orang staf pengelola sampah kabupaten Jepara. Wawancara terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan di desa serta upaya untuk menggunakan produk sampah yang bisa didaur ulang.

- 3) Rembug desa, metode ini digunakan untuk menggali masukan dari tokoh desa, kelompok perempuan, karang taruna dan ketua RT dan RW terkait dengan sampah dan pengelolaan sampah serta pembuatan tempat sampah di desa Tempur.

Pada rembug desa diharapkan diikuti oleh semua warga masyarakat Desa Tempur baik itu dari kalangan tokoh masyarakat, ibu-ibu dan anak muda yang tergabung dalam organisasi desa.

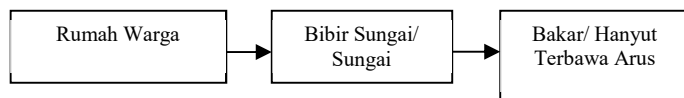
Dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data berupa koding. Poerwandari (2001) berpendapat bahwa koding bertujuan untuk dapat mengorganisasikan mengsistematisasikan data secara lengkap dan mendetail sehingga dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari.

Hasil dan Pembahasan

Asesmen Pengelolaan Sampah

Asesmen ini untuk menggali informasi bagaimanakah pengelolaan sampah yang terjadi di desa Tempur, mengingat begitu banyaknya sampah yang berserakan di sungai dan sekitarnya. Untuk langkah awal, peneliti dibantu oleh dua mahasiswa magang melaksanakan asesmen selama dua bulan dengan melakukan wawancara pada satu tokoh masyarakat, satu anggota karang taruna beserta perangkat desa Tempur serta satu orang bidan desa.

Dari wawancara yang kami lakukan, didapat hasil asesmen sistem pengelolaan sampah yang ada di desa Tempur sebagai berikut :



Jadi, sampah dari rumah tangga akan di bawa atau di kumpulkan di bibir sungai yang nantinya dibakar atau hanyut terbawa sungai ketika hujan turun. Untuk tempat pembakaran sampah sendiri memiliki 3 titik disepanjang bibir sungai. Satu titik pembakaran digunakan oleh 3 RT sedangkan 1 RT bisa mencapai 30-40 kepala rumah tangga. Belum lagi untuk sampah yang tidak bisa dibakar seperti popok bayi yang penggunaanya mencapai 180 popok per RW tiap harinya.

Untuk keluarga yang memiliki lahan di dekat rumah akan membuat lubang guna mengubur popok, sedangkan yang tidak memiliki lahan lebih memilih membuangnya di sungai atau anak sungai terdekat. Padahal fungsi sungai di desa Tempur sangat vital karena sebagai sarana pembudidayaan ikan, mandi dan pengairan sawah.

Berkaitan dengan adanya perilaku membuang sampah di sungai, diutarakan oleh Kepala Desa Tempur, Bapak S:

“Pihak desa terkait sebenarnya sudah memberikan sosialisasi pengelolaan sampah dan penggunaan tempat sampah organik dan nonorganik di setiap RT agar masyarakat dapat memilah manakah sampah yang masih bisa dikelola dan tidak dapat digunakan lagi. Namun, minimnya kemandirian dan kesadaran masyarakat menyebabkan belum maksimalnya dalam pelaksanaannya”.

Ditambahkan oleh Ketua Karang Taruna Mas K, yang mengatakan:

Untuk meningkatkan kepedulian dan kemandirian masyarakat tentang pengelolaan sampah, perangkat desa dan karang taruna telah memberikan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk dari sampah organik sehingga terbentuklah kelompok tani.

Sedangkan bidan desa, bernama Ibu I lebih jelasnya mengatakan sebagai berikut:

“Masyarakat sebenarnya sudah merasakan dampak dari membuang sampah di sungai seperti bau yang tidak sedap, gatal-gatal dan banjir dimusim kemarau. Namun mereka menganggap bahwa belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang menyebabkan membuang sampah dan limbah dapur di sungai”

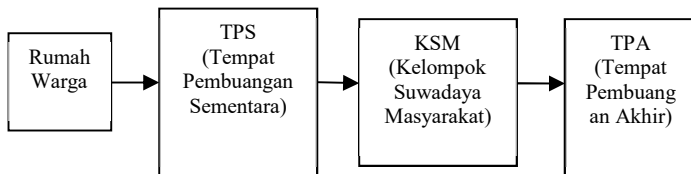
Belum adanya petugas pengambil sampah, lahan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan campur tangan dari pemerintah kabupaten terkait untuk pengadaan TPA menjadi penghambat untuk pengembangan dan pengelolaan sampah lebih lanjut, sehingga masyarakat berpandangan membuang sampah di pinggir sungai lebih efektif.

Rembug Desa, 31 Oktober 2016

Dua bulan sebelum pelaksanaan rembug desa, peneliti melakukan kontak dengan karang taruna desa Tempur, Argo Mulyo, yang dikenal sebagai salah satu wadah anak muda yang aktif di desa Tempur, Kabupaten Jepara untuk melaksanakan kegiatan rembug desa. Penyiapan mulai dari teknis rembug desa yang akan dilakukan seperti: perijinan, peserta, makanan ringan dan jadwal. Setelah mendapat kepastian tanggal dan jam serta tempat maka peneliti menghubungi pembicara yang akan terlibat dalam rembug desa.

Pembicara yang akan terlibat dalam rembug desa adalah kepala desa Tempur, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptakaru) Kabupaten Jepara dan ibu Sri Setuni, pengelola dan pemilik bank sampah Jati Asri dari Kudus yang hasil kerajinan daur ulang sampahnya terjual sampai ke luar negeri.

Rembug desa dimulai setelah waktu sholat Asar tiba jam 15:00, diawali dengan pembukaan oleh Ketua Karang Taruna Tempur, Kiswanto dan ulasan sedikit oleh peneliti kenapa acara ini diadakan. Kemudian dilanjutkan oleh pembicara pertama, yaitu kepala desa Tempur, Sutoyo yang dengan tegas berharap di forum ini bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya dan bisa ada masukan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di desa. Sedangkan pembicara kedua, dari Dinas Ciptakaru (Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan), berbicara mengenai alur pengelolaan sampah dari rumah tangga sampai tempat pembuangan akhir.



Jadi, dari rumah warga sampah dikelola atau dipilah dari sumbernya dengan cara dipilah sampah organik dan nonorganik setelah tidak dapat dikelola baru di buang ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) untuk dikelola lebih lanjut oleh KSM untuk di daur ulang atau di manfaat yang lain seperti dijadikan pupuk dan lain-lain. Setelah benar-benar tidak dapat dikelola baru diangkut oleh truk sampah untuk dibuang ke TPA pusat. Dinas Ciptakaru hanya berperan untuk jasa pengangkutan sampah dari TPS dan

penyediaan tempat sampah dipinggir jalan juga sentral fasilitas umum seperti pasar dan terminal.

Untuk permasalahan desa Tempur adalah desa yang membutuhkan TPA atau TPS dinas Ciptakaru (Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan) mengimbau agar masyarakat membentuk KSM atau orang-orang yang peduli dengan kebersihan desa wisata Tempur yang nantinya dapat bermitra dengan pengusaha atau menghubungi Ciptakaru untuk bantuan bangunan dan kendaraan pengangkut sampah dari RT.

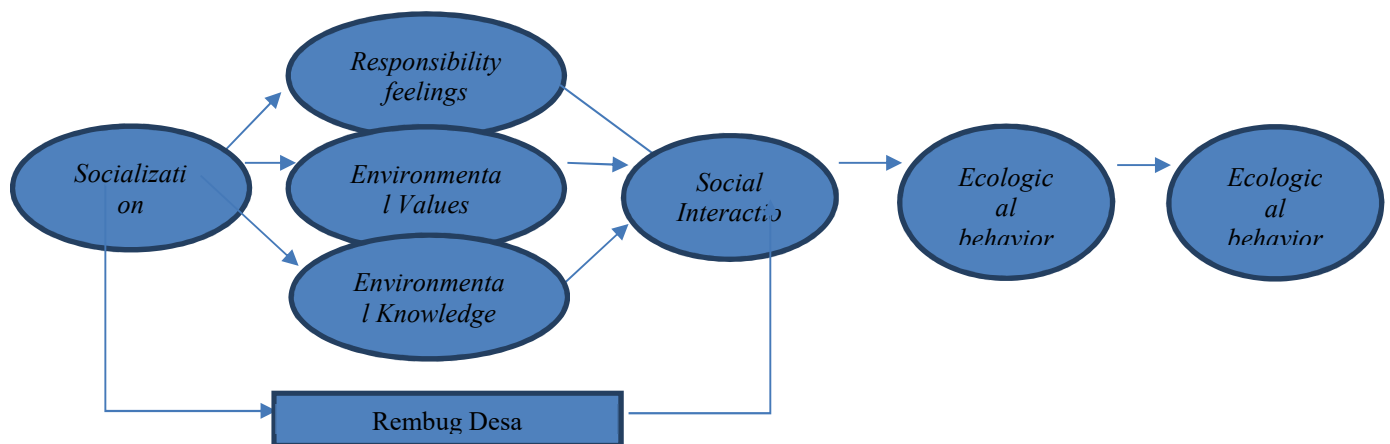
Pembicara terakhir, Ibu Sri Setuni menjelaskan dengan detail pemisahan sampah organik dan nonorganik serta cara membuat sampah yang bisa dikreasi dalam bentuk kerajinan tangan seperti bungkus minyak goreng, bungkus detergen dan bungkus sabun cuci tangan serta bungkus minuman ringan dalam berbagai macam bentuk tas, termasuk tas untuk pergi ke pasar, tempat pakaian kotor, tas laptop serta mengajari cara menjualnya berdasarkan dari pengalamannya mengelola bank sampah. Ibu Sri Setuni menjualnya dengan cara *getok tular*, memasang foto-foto tas hasil kreasi dalam media sosial, juga acap kali mengikuti pameran-pameran produksi lokal yang diadakan pemerintah dalam berbagai acara.

Setelah para pembicara mengungkapkan pemikiran dan pengalamannya, maka peserta rembug desa yang diikuti 30 peserta dari kelompok ibu-ibu yang tergabung di PKK dan 10 orang tokoh desa dan bapak-bapak yang tergabung di BPD dan 30 anak muda dari karang taruna desa Tempur ini kemudian membahas kondisi desa Tempur yang masih banyak warganya membuang sampah di sungai dan upaya pihak desa untuk membangun tempat pembuangan sampah akhir.

Akhirnya rembug desa diakhiri sebelum waktu magrib tiba jam 17:15 memberikan kesimpulan adanya keinginan masyarakat dan pemerintah desa untuk memiliki tempat pembuangan sampah akhir, adanya keinginan untuk membuat kreasi dari bahan sampah serta pengelolaan sampah yang lebih terkoordinir agar terciptanya desa wisata Tempur yang bersih.

Jadi rembug desa yang dihadiri oleh banyak pihak merupakan salah satu proses untuk saling menginformasikan dan menguatkan perlunya perilaku ekologis diantara masyarakat desa Tempur agar mendapatkan hasil perubahan perilaku ekologis yaitu adanya pengetahuan akan pengelolaan sampah rumah tangga dan membentuk kesadaran memelihara lingkungan dengan tidak lagi membuang sampah di sungai.

Dijelaskan oleh peneliti dalam bagan di bawah ini:



Diskusi

Berdasarkan hasil asesmen dan rembug desa maka warga desa Tempur mulai tergugah untuk mengelola sampah dan pembuatan tempat sampah akhir dirancang berdasarkan usulan dari karang taruna desa Tempur dan dikuatkan oleh beberapa pendapat tokoh masyarakat. Satu lokasi tempat sampah pembuangan akhir ada di pinggir sungai berdekatan dengan sawah milik pak kepala desa sedangkan posisi satunya berada di tanah milik pak Suwandi yang telah mengizinkan untuk dipakai sebagai tempat sampah pembuangan akhir, ke dua lokasi tersebut dihibahkan pada desa untuk dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan pemilihan tempat tersebut maka ke dua tempat pembuangan sampah dikerjakan bersama-sama secara bergotong royong selama dua minggu dengan anggaran alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 12.000.000, sedangkan untuk pasir dan batu swadaya. Pembangunan tempat sampah yang ada di pinggir sungai berdekatan dengan sawah milik pak kepala desa terlebih dahulu, kemudian disusul membuat tempat sampah yang berada di tanah milik pak Suwandi. Tempat pembuangan sampah mulai digunakan setelah jadi semua pada tanggal 26 September 2017.

Adanya tempat pembuangan sampah dan terbentuknya kelompok pengelola sampah diharapkan dapat menjadikan masyarakat di desa Tempur, Kabupaten Jepara memiliki perilaku ekologis dengan membuang sampah di tempatnya.

Pengetahuan tentang lingkungan dipakai dalam beberapa penelitian untuk menganalisis jenis-jenis perilaku ekologis seperti memakai kendaraan umum (Walton, Thomas & Dravitz, 2004) dan membeli *green product* (Aman, Harun & Hussein, 2012) sehingga menurut peneliti semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai lingkungan, maka semakin tinggi pula kemungkinannya seseorang melakukan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, salah satunya

adanya kebutuhan membuat tempat sampah dan perilaku membuang sampah di tempatnya.

Schwartz (2012) mendefinisikan nilai merupakan keyakinan dan gagasan seseorang tentang tujuannya. Nilai digunakan untuk mengevaluasi suatu keadaan dan sebagai penentu berperilaku bagi seseorang. Nilai yang terkandung dalam diri seseorang menentukan bagaimana cara pandang seseorang mengenai objek-objek tertentu, semakin seseorang memiliki nilai-nilai yang berhubungan dengan lingkungan, maka akan membuat seseorang lebih memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan.

Ditambahkan oleh Kahle (1996), seperti dikutip oleh Fraj dan Martinez (2006) bahwa nilai lingkungan dapat diperkuat dengan pengalaman dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam konteks lingkungan, perilaku orang yang memiliki nilai lingkungan dapat dilihat dari ekspresi atau tanggapan dirinya terhadap lingkungan yang ada, dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, yang ada di rumah dan di sekitarnya, dengan tidak lagi membuang sampah di sungai dan nilai lingkungan ini juga diinformasikan ke semua orang dalam bentuk rembug desa

SIMPULAN

Ada 30 anak muda yang tergabung dalam karang taruna dan 10 bapak-bapak masyarakat yang ada di Desa Tempur, Kabupaten Jepara bergotong royong membersihkan sungai dari sampah dan ada satu ibu yang mulai mengelola daur ulang sampah menjadi bahan tas serta dibangunnya dua tempat pembuangan sampah umum di pinggir sungai.

SARAN

Saran untuk kegiatan intervensi perilaku ekologis pengelolaan sampah selanjutnya yaitu: Diperlukan pemantauan yang dilakukan oleh kelompok yang aktif

di desa Tempur agar masyarakat tetap memiliki perilaku ekologis dalam membuang sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Aman, A., Harun, A., & Hussein, Z. (2012). The influence of environmental knowledge and concern on green purchase intention the role of attitude as a mediating variable. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 7 (2), 145-167. Retrieved from: <http://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspx>.
- Fraj, E., and Martinez, E (2006), Environmental values and lifestyles as determinin factors of ecological consumer behaviour: an empirical analysis. *Journal Of Consumer Marketing*, Vol.23. No.3, pp. 133-144.
- Frick, J., Kaiser, F.G. & Wilson, M (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample. *Personality and individual differences*, 3 (2), 1597-1613.
- Kaiser, F.G. (1998). A general measure of ecological behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 28, 395-42.
- Kaiser, F. G., Wolfing, S.; Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological behavior. *Journal of Environmental Psychology*, 19, 1-19.
- Kaiser, F. G., & Shimoda, T.A. (1999). Responsibility as a predictor of ecological behavior. *Journal of Environmental Psychology*, 19, 234-253.
- Kaiser, E.G; Ranney, M ; Hartig, T; Bowler, A.P. (1999). Ecological behavior, environmental attitude, and feeling of responsibility for the environment. *Euopen Psychologist*, Vol.4, No.2, June.
- Poerwandari, E. K. (2001). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Univesitas Indonesia.
- Prijono, Y.M dan Tjiptoherijanto, P. (1983). *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan
- Schwartz, S.H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. *Online reading in psychology and culture*, 2 (1), 1-20. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116>.
- Sururi, A dan Mulyasih, R. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *ENGAGEMENT Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online). Volume 1, Number 2, November 2017.
- Walton, D., Thomas, J., & Dravitzki, V. (2004). Commuters' concern for the environment and knowledge of the effects of vehicle emissions. *Transportation research*, 9 (4), 335-340. DOI:10.1016/j.trd.2004.04.001.
- Widjanarko, M. (2014). *Psikologi Lingkungan: Berbasis Kearifan Lokal*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus
- Wibowo, I. (2009). Pola Perilaku Kebersihan: Studi Psikologi Lingkungan Tentang Penanggulangan Sampah Perkotaan. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol 13, No 1, Juli 2009:37-47